

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)**

abstract

Public sector performance measurement is a system that aims to help public managers in assessing the achievement of a strategy through measurement tools of financial and non-financial. The elements contained in a Local Government Finance Report (LKPD) can describe the characteristics of the local governments concerned. This study aimed to examine the effect of the characteristics of local governments on the financial performance of local governments By using variable size (size), intergovernmental revenue, and shopping areas. This study examines the Local Government Finance Report 2014 by taking a sample of 30 regencies / cities in East Java which is collected from the official website of East Java Province through www.djpk.kemenkeu.go.id. The results showed that the size of government (size), intergovernmental revenue and expenditure affect the performance of the local government.

Keywords: Financial performance, characteristics, size of the local government (size), Intergovernmental revenue, Shopping Area

Writer:
Asmaul Aziz

Correspondence:
aaziz_ak@yahoo.com

Institution:
Universitas Islam Majapahit
Mojokerto

EKSIS
Vol XI No 1, 2016

ISSN:
1907-7513

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>

abstrak

*Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Elemen-elemen yang terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan proksi ukuran (size), *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah. Penelitian ini meneliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 dengan mengambil sampel 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timuryang dikumpulkan diperoleh dari situs resmi Provinsi Jawa Timur melalui www.djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda (size), *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.*

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Karakteristik, Ukuran Pemda (size), Intergovernmental revenue, Belanja Daerah

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah biasanya diterapkan di negara-negara yang demokratis dan erentuk serikat dan kesatuan. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Ahid, 2014).

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999 yang didahului krisis ekonomi sekitar tahun 1997. Latar belakang otonomi daerah timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik.

Indonesia mulai melaksanakan sistem otonomi daerah sejak masa reformasi berlangsung yaitu tahun 1999 melalui UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 UU No.22 tahun 1999 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan UU No.32 tahun 2004. Sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan UU No.12 tahun 2008. Sejalan dengan undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk

memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. (Kabus, 2012).

Kebijakan otonomi daerah dalam realisasinya masih banyak persoalan dan kendala implementasi, yang disebabkan oleh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, aturan pelaksanaannya yang selalu berubah serta kepentingan politik lebih dominan dari pada kepentingan ekonomi atau lainnya (Nanang, 2008). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berskala atas capaian daerah dalam kurun waktu tertentu (Sumarjo, 2010) dan merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah *pertama*, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. *Kedua*, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. *Ketiga*, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*. *Keempat*, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2004).

Menurut Bastian (2010) kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam penelitian Azhar (2008) kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu

entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007). Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nasution, 2011), *Intergovernmental revenue* (Sesotyningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010) bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian Sumarjo (2010) studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Hendro Sumarjo menghasilkan pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Kemakmuran (*wealth*) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hendro Sumarjo dengan perbedaan penambahan variabel dengan belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, betapa pentingnya karakteristik pemerintah daerah menjadi salah satu bahasan yang menarik dalam kajian akuntansi sektor publik sehingga dalam peneliti penelitian diharapkan

dapat menjawab pertanyaan penelitian ; “Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur “.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hendro Sumarjo yang menggunakan beberapa variabel independen yaitu ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue*. Pada penelitian tersebut dua variabel independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran legislatif dan kemakmuran (*wealth*). Dengan mempertimbangkan berbagai hal maka peneliti menggunakan variabel belanja daerah sebagaimana yang telah digunakan oleh Mustikarini, dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah di Indonesia

Definisi dalam arti luas dan sempit tentang pemerintah daerah di dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah, pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI 45². Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah

dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sistem Akuntansi Pemerintah

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pemerintah, untuk menciptakan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), lalu juga Proses Akuntansi yang baik, sehingga terciptalah Laporan Keuangan yang baik, untuk dapat digunakan oleh pemerintah, pemeriksa, DPR, dan masyarakat (yang mempunyai kemampuan membaca laporan keuangan).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP 24 Tahun 2005 ini yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah, dan keluaran dari sistem akuntansi itu pun nantinya harus sesuai dengan standar akuntansi. Singkatnya, SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran

yang sesuai dengan SAP. Jadi antara SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada ; (1) Masyarakat, (2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, (4) Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan adalah merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya (Harahap 2002:7). Syafri (2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 / 2010) disebutkan bahwa pelaporan keuangan memiliki peranan sebagai "Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 maka laporan keuangan setidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat / daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN / APBD. Pelaporan mencerminkan keuangan pemda yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD.
2. Neraca
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, antara lain kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, asset tetap, kewajiban jangka panjang pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.
3. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan, kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di mana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(1997, hal 503) adalah merupakan kata benda yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja.

Menurut Silalahi (2012) Kinerja juga dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Sedangkan menurut Bastian (2006:274) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Berdasarkan Undang – undang No.33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara *efforts* dengan *outputs* dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai (Sardjiarto, 2000).

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik, di mana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya :2000). Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan

pelaporan kinerja melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007).

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Schiff dan Lewin (1970), mengemukakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, Argyris (1952) dalam Titisari (2004) juga menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Karakteristik adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di perhatikan (Nanda, 2013). Elemen-elemen yang terdapat dalam suatu LKPD dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah yang bersangkutan (Lesmana, 2010).

Semakin besar asset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat (Mustkarini dan Fitriarsari, 2012). Pada penelitian – penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik Pemerintah Daerah sering digunakan sebagai proksi dalam item –

item pada laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, *intergovernmental revenue* diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan, dan belanja daerah diproksikan dengan total realisasi belanja daerah sebagai variabel independen.

Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja negara. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan :

- a. **Pengaruh Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.** Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut (Syafitri, 2012). Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya (Cooke, 1992). Pemerintah daerah akan cenderung memberikan *good news* dalam mengungkapkan laporan keuangannya. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut (Sumarjo, 2010). Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Pemerintah daerah perlu

mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Hal ini tentu berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), serta penelitian Mustikarini, dan Fitriasari (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh positif ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- b. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.** Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi Pemerintah Daerah. *Intergovernmental Revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam, 2001). Transfer tersebut lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). *Intergovernmental revenue* adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Siregar, 2001). *Intergovernmental revenue* diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas daerah sehingga kinerja pemerintah daerah

akan semakin baik. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah, akan semakin baik pula kinerja keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : Terdapat pengaruh positif *Intergovernmental Revenue* pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- c. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Penelitian Mustikarini, dan Fitriasari (2012) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :
 H_3 : Terdapat pengaruh positif Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2010). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014 yang dikumpulkan diperoleh dari situs resmi Provinsi Jawa Timur melalui www.djpk.kemenkeu.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. dengan mengambil sampel sebanyak 30 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan tertentu yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dibuat peneliti.

Kriteria dalam penelitian ini adalah :

1. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014 dari situs resmi Provinsi Jawa Timur melalui www.djpk.kemenkeu.go.id.
2. Menyediakan komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat sampel sebagai berikut:

Tabel 1: Hasil Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Kabupaten / Kota di Jawa Timur	38
Kabupaten / Kota yang tidak memiliki laporan neraca	8
Kabupaten / Kota yang memenuhi kriteria penelitian	30

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah.

1. Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah
Ukuran (*size*) pemerintah daerah menurut Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Syafitri, 2012).
2. Intergovernmental Revenue
Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Proksi dari *intergovernmental revenue* dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana

perimbangan dengan total pendapatan (Sumarjo, 2010). Pengukuran ini dipilih karena *intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (80% - 98%) (Suhardjanto et al., 2010).

intergovernmental revenue = Total Dana Perimbangan / Total Pendapatan

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Badan Pusat Statistik, 2010).

Variabel Dependen

Variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

Efisiensi = Realisasi Pengeluaran/Realisasi Pendapatan

Tabel 2 : Definisi Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel/Dimensi	Indikator
Independen (X) : Karakteristik Pemerintah Daerah	X ₁ : Ukuran(Size) Pemerintah Daerah	Total Aset Pemerintah Daerah
	X ₂ : Intergovernmental Revenue	Total Dana Perimbangan terhadap Total Dana Pendapatan
	X ₃ : Belanja Daerah	Total Realisasi Belanja Daerah
Dependen (Y) : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		Realisasi Pengeluaran terhadap Realisasi Pendapatan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul dalam penelitian ini.

Tabel 3 : Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Efisiensi	1.037	0.790	1.170	0.069
Size*	2,910,842	902,991	8,735,235	1,642,000
in_rv	0.684	0.44	0.81	0.07651
Bd*	1,345,417	511,092	2,527,542	469,018

*satuan dalam jutaan rupiah, Sumber: Data diolah, 2016

Kinerja keuangan pemerintah di Jawa Timur memiliki Nilai rata-rata sebesar 1,037 berarti bahwa pemerintah daerah di Jawa Timur tergolong memiliki kinerja yang tidak efisien. Kinerja pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100 persen. Hasil menunjukkan bahwa pemda di Jawa Timur belum membelanjakan dananya sesuai anggaran serta masih buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Nilai maksimum atau efisien terendah sebesar 1,170 diperoleh pemerintah daerah kota Batu atau tingkat Efisiensi sebesar 117% .

Nilai minimum atau efisiensi tertinggi sebesar 0,79 yaitu pemerintah daerah kabupaten Sampang. Menurut Hamzah (2009), pemerintah daerah telah dapat menggunakan dana yang ada sesuai dengan yang dianggarkan, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Size digunakan untuk mengukur total aset sebagai karakteristik pemerintah daerah di Jawa Timur memiliki nilai rata-rata Rp 2.910.842.000.000,00. Total aset terendah dimiliki oleh pemerintah daerah kota Batu sebesar Rp 902.991.000.000,00 sedangkan total aset tertinggi di miliki oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 8.735.235.000.000,00

Karakteristik pemerintah daerah yang kedua yaitu intergovernmental revenue yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,68. Nilai terendah sebesar 0,44 dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Sampang dan nilai tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah kota Batu sebesar 0,81.

Karakteristik pemerintah daerah yang terakhir yaitu belanja daerah yang memiliki nilai rata-rata Rp

1.345.417.000.000,00. Nilai terendah sebesar Rp 511.092.000.000,00 dimiliki oleh pemerintah daerah kota Mojokerto dan nilai tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 2.527.542.000.000,00.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut :

1. jika *tolerance value* < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi multikolinieritas
2. jika *tolerance value* > 0,01 atau VIF < 10% maka tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Size	0.364	2.744
in rv	0.611	1.636
Bd	0.431	2.320

a. Dependent Variable: efisiensi

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,01 dan nilai *value inflating factor* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10.

Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. jika nilai signifikan (*probability value*) < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas
2. jika nilai signifikan (*probability value*) > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5 : Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0.124	0.093		1.337	0.193
size	4.35	0	0.185	0.625	0.537
in_rv	-0.14	0.115	-0.276	-1.211	0.237
bd	-7.878	0	0	-0.004	0.997

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa *probabilitas (sig)* dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat Uji *One Sample Kolomogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform*, atau *exponential* untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan *probability value* yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan bahwa :

1. jika nilai signifikan (*probability value*) > 0,05 maka data terdistribusi normal.
2. jika nilai signifikan (*probability value*) < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6: Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	0.05690409
Most Extreme Differences	Absolute	0.133
	Positive	0.126
	Negative	-0.133

Kolmogoro v-Smirnov Z	0.726
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.668

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan *asymp sig.* sebesar 0,668 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Run Test*. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. jika nilai signifikasnsi > dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala autokolerasi
2. jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka terjadi gejala autokolerasi.

Hasil uji autokolerasi dengan *Run Test* diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0.193 yang lebih besar dari 5%, sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala autokolerasi dalam model penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression analysis*), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$KNJ = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 IR + \beta_3 BD + e$$

Tabel 7 : Keterangan Persamaan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
KNJ	Kinerja keuangan
SIZE	Ukuran pemerintah daerah
IR	<i>Intergovernmental Revenue</i>
BD	Belanja daerah
α	Konstan
$\beta_1 \dots \beta_3$	Koefisien regresi
e	Error

Sumber: Data diolah, 2016

Uji Signifikansi-F

Uji signifikansi-F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama/simultan terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut ;

1. Jika *probability value* dalam hasil pengujian lebih $<$ dari 5%, maka dinyatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian karena variabel karakteristik pemerintah daerah (ukuran (*size*) pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. jika *probability value* $>$ 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Berikut disajikan hasil uji signifikansi-F dalam penelitian ini.

Tabel 8 : Hasil Uji Signifikansi -F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.043	3	0.014	3.992	0.018 ^a
Residual	0.094	26	0.004		
Total	0.137	29			

a. Predictors: (Constant), *bd*, *in_rv*, *size*

b. Dependent Variable: *efisiensi*

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% sebesar 0,018. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau

dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis

regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien regresi

Tabel 9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	0.315	0.236	0.0601

a. Predictors: (Constant), *bd*, *in_rv*, *size*

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian bahwa nilai *Adjusted R2* sebesar 0,315 yang mengindikasikan 31,5% bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran (*size*), *intergovernmental revenue* dan belanja daerah mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,315 atau 31,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 68,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji Koefisien Regresi

Uji signifikansi-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

Tabel 10 : Hasil Uji Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coeff	t	Sig.
1 (Constant)	0.523	0.15		3.488	0.002
<i>size</i>	1.62E-08	0	0.388	1.442	0.016
<i>in_rv</i>	0.641	0.187	0.713	3.434	0.002
<i>bd</i>	2.16E-08	0	0.147	0.596	0.055

Sumber: hasil pengolahan data

Hasil pengujian data di atas mengindikasikan bahwa variabel independen baik ukuran (*size*), *intergovernmental revenue* dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang terbukti dengan nilai *probabilitas* untuk semua variabel penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%, 5 %, dan 10 %. Berikut hasil Uji Koefisien Regresi :

1. Variabel ukuran (*size*) memiliki nilai *sig* 0,016. Nilai *sig* 0,016 lebih kecil

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah :

1. jika *probability value (sig)-t*, lebih kecil dari 5%, maka artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian.
2. jika *probability value (sig)-t* lebih besar dari 5%, maka artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak didukung oleh data penelitian.

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini.

- dari tingkat signifikansi sebesar 5% berarti variabel ukuran (*size*) berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja keuangan) sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima atau didukung oleh data penelitian.
2. Untuk variabel *intergovernmental revenue* memiliki nilai *sig* sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang berarti variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap variabel

dependen (kinerja keuangan) sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima atau didukung oleh data penelitian.

3. Variabel belanja daerah memiliki bernilai *sig* sebesar 0,055 lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% yang berarti variabel belanja daerah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian.

Berdasarkan tabel diatas koefisien regresi untuk variabel ukuran (*size*) adalah positif yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Cooke (1992) mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melakukan pengungkapan. Besarnya tuntutan publik untuk melakukan pengungkapan akan berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki entitas tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan *good news* dalam mengungkapkan laporan keuangannya.

Tanda koefisien regresi yang positif untuk variabel *intergovernmental revenue* mengindikasikan bahwa semakin tinggi *intergovernmental revenue* semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Patrick, 2007). Besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) bahwa semakin besar transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sehingga pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Variabel belanja daerah, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

E. PENUTUP

Penelitian ini menguji secara karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2014. Ada beberapa simpulan dari penelitian ini. *Pertama*, terdapatnya pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Diharapkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran (*size*) yang besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. *Kedua*, variabel *Intergovernmental revenue* juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksananya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti yang didapat dalam penelitian ini bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh

positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bukti ini mendasari simpulan bahwa semakin besar *intergovernmental revenue* maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Karena belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Indonesia khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya. Pemerintah sebaiknya lebih menekankan penggalan potensi sumber daya alam maupun manusia di tiap-tiap daerah. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian tiap daerah.

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen yang lain baik dari data keuangan ataupun data non keuangan agar lebih lengkap dan bervariasi. Dan diharapkan juga agar memperluas obyek penelitian dengan penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang waktu periode penelitian yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anzarsari, Desy. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa tengah). *Skripsi Program Ekonomi Akuntansi*. Program Sarjana Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Bahrullah Akbar, Siti Nurbaya. (2000). *Akuntabilitas Daerah : Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan, Vol 01, No. 01.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Erikson. (2012). Contoh *Makalah Akuntansi Sektor Publik*. Di akses pada 12 Mei 2016. <http://ondyx.blogspot.co.id/2015/04/contoh-makalah-akuntansi-sektor-publik.html>.
- Fuad, Ramli. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fadhila, nur. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2015). Diakses 15 Juli 2016. <http://www.potretakuntansi.xyz/2015/12/sistem-akuntansi-pemerintah-pusat-dan.html>.
- Furqan, Chairil, Andi. Pengguna Laporan Keuangan. (2013). Diakses 27 Juli 2016. <https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengguna-laporan-keuangan-pemerintah.html>.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi sektor Publik*. Akuntansi keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2002). "Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Juan, Dynash. Sistem Pemerintahan daerah Ekonomi. (2014). Diakses 24 Juni 2016 <http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html>.

- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mishba. Pengertian Pemerintah Daerah. (2015). Diakses 7 Juli 2016. <http://www.mishba7.com/2015/11/pengertian-pemerintah-daerah.html>.
- Nordian, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, Hasanuddin, (2009). *Psikometri Aplikasi Penyusunan Instrumen Pengukuran Perilaku*. Bandung: Fakultas Psikologi UNISBA.
- Perwitasari, Citra. (2010). *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Yudistisia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Syafri Harahap, Sofyan, (2008). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi Program Ekonomi Akuntansi*. Program Sarjana Akuntansi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syafitri, Febriyani. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Skripsi Program Ekonomi Akuntansi*. Program Sarjana Ekstensi Akuntansi. Depok: Universitas Indonesia.
- Sarwoko. (2005), *Dasar-dasar Ekonometri*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.